PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu hukum**

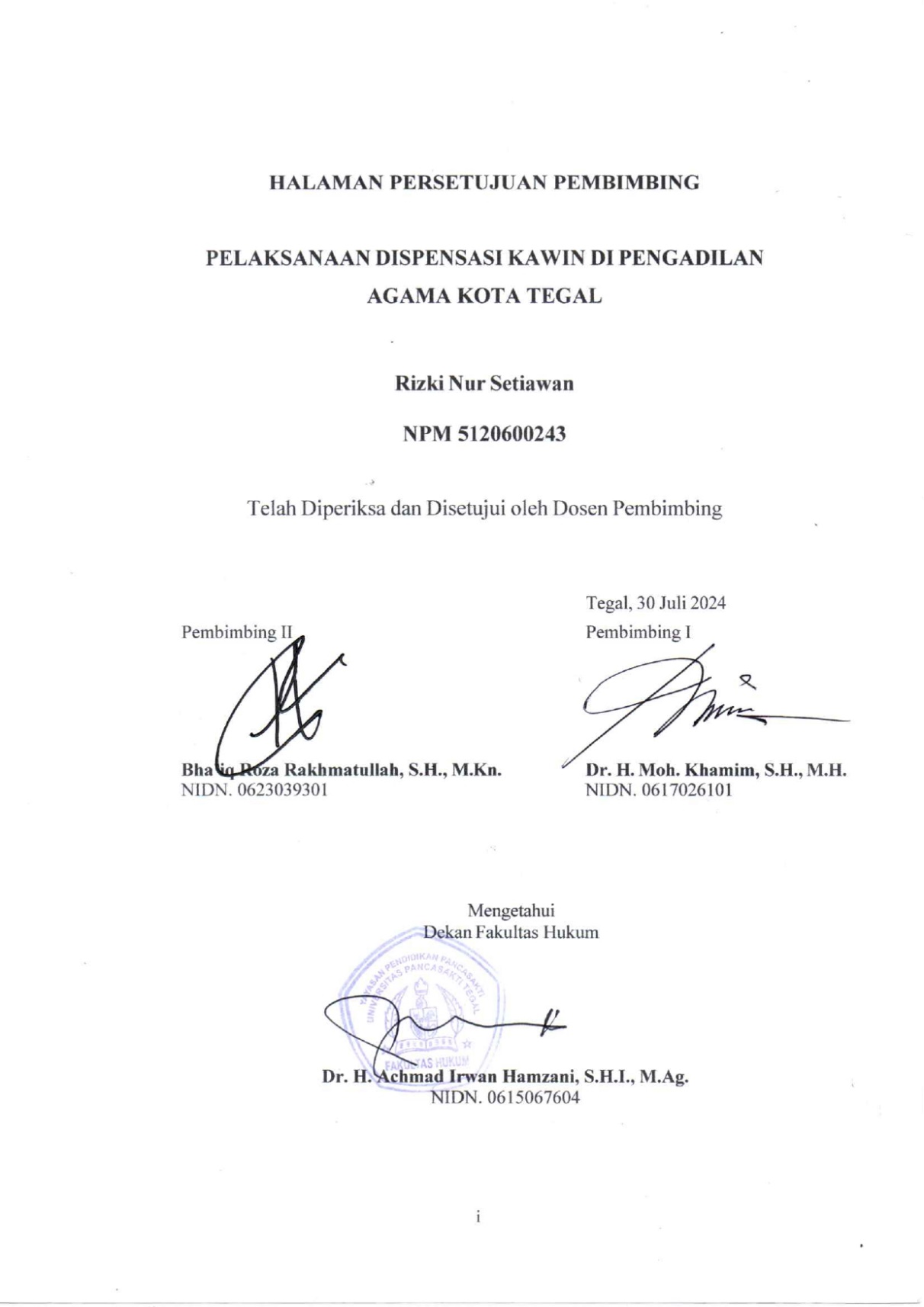
**Oleh :**

**RIZKI NUR SETIAWAN**

**NPM 5120600243**

# FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**2024**



## 

## ABSTRAK

Dispensasi perkawinan adalah mekanisme yang memungkinkan pasangan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal atau ketentuan agama tertentu untuk tetap sah secara hukum. Implementasi dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tegal merupakan sebuah proses yang melibatkan pertimbangan hukum dan keagamaan dalam memberikan izin perkawinan di luar ketentuan normatif yang berlaku. Dispensasi nikah di Kota Tegal merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi pengadilan dalam menangani kasus dispensasi kawin, menetapkan prosedur, dan tata cara yang harus diikuti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama memberikan dispensasi untuk calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, peran hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan dispensasi harus dipertimbangkan secara bersamaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dispensasi ini diterapkan di Pengadilan Agama Kota Tegal, dengan menyoroti proses pengajuan, pertimbangan hukum, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan disertai studi kepustakaan sebagai pendukung penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat dikatakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tegal merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan individu dalam ranah hukum islam dengan mempertimbangkan prnsip keadilan dan kemaslahatan sosial dalam proses hukum.

**Kata Kunci** : Dispensasi, Perkawinan, Undang-Undang, Pengadilan

*ABSTRACT*

*Marriage dispensation is a mechanism that allows couples who wo not meet formal requirements or certain religious provisions to remain legally valid. Implementation of the marriage dispensation at the Tega City Religious Court is a process that involves legal and religios considerations in granting marriage permits outside of the applicable normative provisions. Marriage dispensation in Tegal City refers to Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. This regulation is the main guideline for courts in handling marriage dispensation cases, establishing procedures and procedures that must be followed. Based on Law Number 16 of 2019, the Religious Courts provide dispensation for prospective brides and grooms who are not yet 19 years old to enter into marriage. The role of the judge in considering and deciding to grant dispensation must be considered simultaneously. This research explores how this dispensation is implemented in the Tegal City Religious Court, by highlighting the application process, legal consideration, and decisions taken by the court. The research method used is field research accompanied by literature study to support field research. The results of this research are that it can be said that the marriage dispensation at the Tegal City Religious Court is an effort to accommodate individual needs in the realm of Islamic law by considering the principles of justice and social benefit in the legal process.*

***Keywords*** *: Dispensation, Marriage, Constitution, Court*

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Cakiyan dan Alm. Ibu Sariti, serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik secara moril maupun materil.

2. Kakak tersayang Indah Hastuti dan Saoti

3. Kekasih tercinta Rahel Febriyanti Permata

4. Teman seperjuangan kelas E Perdata

5. Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023.

6. Dosen pembimbing (Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H dan Bapak Bha’iq Roza Rahmatullah S.H., M.Kn.)

7. Dosen Penguji (Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. dan Dr.H. Imawan Sugiharto,.S.H., M.H.)

**MOTTO**

**“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu”**

## -Umar Bin khatab-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Tegal". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasakti Tegal. Dalam proses penyusunannya, saya banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H dan Bapak Bha’iq Roza Rahmatullah S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama membimbing penulis. Tidak lupa pula segala saran dan motivasinya yang begitu berharga serta kesabarannya dalam memberikan arahan-arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, seluruh civitas akademik yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membantu selama perkuliahan serta para staff tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan-layanan setiap penulis membutuhkan.
7. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Cakiyan dan Alm. Ibu Sariti yang selalu memberikan do’a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu diberikan tempat yang terbaik.
8. Untuk Kakak Indah Hastuti dan Saoti. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, terima kasih atas segala dukungan, cinta, dan support yang telah diberikan selama ini serta telah menjadi inspirasi bagi perjalanan akademis saya.
9. Untuk Rahel Febriyanti Permata. Terima kasih atas, cinta, pengertian serta dukungan moral yang telah diberikan selama proses perjalanan akademis saya dari awal hingga sampai saat ini.
10. Teruntuk sahabat seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk segala waktu, dukungan, dan bantuannya selama 4 tahun, memberikan arti sebuah ketulusan dan kebersamaan hingga berjuang bersama sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum.

Tegal, 30 Juli 2024

Rizki Nur Setiawan

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc172707989)

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

[ABSTRAK iii](#_Toc172707990)

ABSTARCT iv

LEMBAR PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

[KATA PENGANTAR v](#_Toc172707991)ii

[DAFTAR ISI ix](#_Toc172707992)

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xi

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc172707994)

[A. Latar Belakang 16](#_Toc172707995)

[B. Rumusan Masalah 1](#_Toc172707996)6

[C. Tujuan Penelitian 1](#_Toc172707997)6

[D. Urgensi Penelitian 1](#_Toc172707998)7

[E. Tinjauan Pustaka 1](#_Toc172707999)7

[F. Metode Penelitian 1](#_Toc172708000)9

[1. Jenis Penelitian 1](#_Toc172708001)9

[2. Pendekatan Penelitian 20](#_Toc172708002)

[3. Data Penelitian 20](#_Toc172708003)

[4. Metode Pengumpulan Data 22](#_Toc172708004)

[5. Metode Analisis Data 23](#_Toc172708005)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 24](#_Toc172708006)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 25](#_Toc172708007)

[A. Landasan Teori 25](#_Toc172708008)

[1. Pernikahan 25](#_Toc172708009)

[B. Pernikahan Dini Terkait Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum 37](#_Toc172708010)

[C. Proses Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 46](#_Toc172708011)

[D. Pernikahan Dini Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 56](#_Toc172708012)

[E. Dasar Hukum Dispensasi Kawin di Indonesia 64](#_Toc172708013)

[BAB III](#_Toc172708014) [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76](#_Toc172708015)

[A. Profil Pengadilan Agama Kota Tegal 76](#_Toc172708016)

[B. Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Kota Tegal 8](#_Toc172708019)9

[C. Solusi Pencegahan Dispensasi Kawin Pegadilan Agama Kota Tegal](#_Toc172708020) 100

[BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 116](#_Toc172708024)

[A. KESIMPULAN 116](#_Toc172708025)

[B. SARAN 11](#_Toc172708026)7

[DAFTAR PUSTAKA 11](#_Toc172708027)9

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 12](#_Toc172708028)8

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2024 104

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2024 105

# BAB I

# PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berinteraksi satu sama lain. Diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan, manusia mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasang-pasangan dalam kehidupan mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan untuk mencari pendamping hidup dan melanjutkan keturunan.Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.[[1]](#footnote-1) Menurut majazi, "methaporic" atau "arti hukum" berarti perjanjian atau akad yang menjadikan hubungan seksual sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita halal.[[2]](#footnote-2) Didasarkan pada niat suci, ikatan suami istri di harapkan berkembang menjadi keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang biasa dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil yang disebut keluarga. Dalam masyarakat umum, orang yang berkeluarga dianggap lebih dihargai daripada orang yang tidak berkeluarga.[[3]](#footnote-3)

Manusia pasti akan memilih untuk berpasang-pasangan di salah satu fase kehidupan. Tuhan Yang Maha Esa telah membedakan manusia dari makhluk lain dengan memberi mereka akal dan hawa nafsu. Oleh karena itu, untuk memenuhi hawa nafsunya, manusia dianjurkan untuk menikah.Manusia memerlukan aturan dalam perkawinan. sehingga tidak ada konflik kepentingan dan masyarakat tetap teratur. Perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, sosial budaya, dan bahkan hukum positif. Pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang bermanfaat dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[[4]](#footnote-4) Perjalanan kehidupan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis; tidak ada satu pun keluarga yang hidup dengan mulus sesuai keinginan tanpa adanya gelombang masalah yang selalu berubah. Kemampuan sebuah keluarga untuk menghadapi masalah rumah tangga tergantung pada kematangan suami istri.[[5]](#footnote-5) Usia berpengaruh pada kesehatan mental dan rasa tanggung jawab kedua calon pasangan, sehingga kematangan tersebut dapat dilihat dari kecukupan umur kedua belah pihak mempelai.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur yaitu ketika pasangan yang salah satu atau keduanya masih muda melakukan ikatan perkawinan. Penting untuk memberikan perhatian dan mengatur praktik perkawinan semacam ini dengan jelas agar tidak berdampak luas pada kehidupan.[[6]](#footnote-6) Perkawinan usia anak juga dikenal sebagai perkawinan dini masih dilakukan oleh para orang tua, terutama di beberapa wilayah Nusantara karena adat kebiasaan lokal. Perkawinan usia anak merupakan isu yang berkembang di Indonesia, dengan semakin banyaknya perkawinan yang terjadi pada usia di mana seseorang mungkin belum matang secara emosional dan hormonal. Perkawinan seperti ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, bahkan hal-hal sepele menjadi permasalahan besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya pendidikan mengenai kematangan emosi untuk mengembangkan psikologi yang sehat untuk kesejahteraan mental. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya dijodohkan oleh orang tua mereka tanpa pengetahuan mereka tentang arti dan makna perkawinan.[[7]](#footnote-7) Perkawinan di bawah umur ini dilakukan oleh anak-anak saat mereka berada di masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, saat anak-anak mengalami perubahan yang cepat di semua aspek hidup mereka. Mereka bukan lagi anak-anak, baik dari segi fisik, sikap, dan cara mereka berpikir dan bertindak, tetapi bukanlah orang dewasa yang telah matang.

Dispensasi kawin merupakan salah satu isu penting dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang menikah di bawah usia tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai efektivitas regulasi yang ada serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan masyarakat secara lebih luas.

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi kawin, memiliki peran krusial dalam menentukan nasib pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal. Para hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan kesehatan. Mereka harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemohon dispensasi dengan upaya perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif perkawinan usia dini. Proses pengambilan keputusan ini tentu tidak mudah dan seringkali menimbulkan dilema etis bagi para hakim.

Dalam konteks Pengadilan Agama Kota Tegal, pelaksanaan dispensasi kawin menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagai salah satu kota di Jawa Tengah, Tegal memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri yang mungkin mempengaruhi pola pengajuan dan pemberian dispensasi kawin. Analisis terhadap praktik di Pengadilan Agama Kota Tegal dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait dispensasi kawin serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian dispensasi kawin adalah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Undang-undang mensyaratkan adanya alasan yang mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup. Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap "alasan yang mendesak" ini bisa jadi bervariasi. Ada kalanya alasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial menjadi dasar pengajuan dispensasi. Pengadilan Agama harus mampu menilai kekuatan dan validitas alasan-alasan tersebut, serta mempertimbangkan implikasinya terhadap masa depan calon pasangan dan anak-anak mereka kelak.

Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga menjadi sorotan penting. Bagaimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, bagaimana mereka memastikan bahwa calon pasangan benar-benar memahami konsekuensi dari perkawinan usia dini, serta bagaimana mereka menilai kesiapan mental dan finansial pasangan, merupakan aspek-aspek yang perlu dikaji secara mendalam. Proses ini seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk memastikan bahwa dispensasi yang diberikan adalah untuk kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberian dispensasi kawin juga berkaitan erat dengan isu perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkawinan usia dini dapat mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial yang sehat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus mampu mempertimbangkan aspek perlindungan anak ini dalam setiap keputusan dispensasi kawin yang diambil.Faktor pendidikan juga memegang peranan penting dalam isu dispensasi kawin. Seringkali, pasangan yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau bahkan putus sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan aspek pendidikan ini, tidak hanya sebagai faktor dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai area yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di masa depan.

Aspek kesehatan reproduksi juga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan mengenai dispensasi kawin. Perkawinan usia dini dapat membawa risiko kesehatan yang serius, terutama bagi perempuan. Kehamilan pada usia muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan aspek kesehatan ini dengan seksama, mungkin dengan melibatkan ahli kesehatan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, faktor sosial budaya juga memainkan peran penting dalam praktik dispensasi kawin. Di beberapa daerah, termasuk mungkin di Kota Tegal, perkawinan usia dini masih dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan dianjurkan. Tekanan sosial dan adat istiadat seringkali menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Pengadilan Agama harus mampu menyeimbangkan antara menghormati nilai-nilai budaya setempat dengan upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif perkawinan usia dini.

Dalam konteks hukum Islam, yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama, konsep baligh (kedewasaan) seringkali menjadi acuan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Namun, interpretasi terhadap konsep ini bisa bervariasi dan tidak selalu sejalan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengadilan Agama harus mampu menjembatani antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia, sambil tetap memperhatikan konteks sosial dan perkembangan zaman.

Dampak ekonomi dari perkawinan usia dini juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin. Pasangan muda yang menikah sebelum mapan secara finansial berisiko mengalami kesulitan ekonomi, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan anak-anak mereka. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan kesiapan ekonomi pasangan, termasuk kemampuan mereka untuk menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar anak- anak mereka kelak.

Isu gender juga tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai dispensasi kawin. Perkawinan usia dini seringkali berdampak lebih berat pada perempuan, yang mungkin harus meninggalkan pendidikan dan mengambil tanggung jawab rumah tangga di usia yang sangat muda. Hal ini dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dan membatasi peluang perempuan untuk berkembang. Pengadilan Agama perlu sensitif terhadap isu gender ini dan mempertimbangkannya dalam setiap keputusan dispensasi kawin.

Peran orang tua dalam pengajuan dispensasi kawin juga menjadi sorotan penting. Seringkali, permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua, bukan oleh calon pasangan sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keinginan untuk menikah benar-benar berasal dari anak, dan sejauh mana hal tersebut merupakan keputusan atau bahkan tekanan dari orang tua. Pengadilan Agama harus mampu menggali motivasi sebenarnya di balik pengajuan dispensasi dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi prioritas.

Aspek psikologis juga tidak boleh diabaikan dalam pemberian dispensasi kawin. Kematangan emosional merupakan faktor penting dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pasangan yang menikah di usia dini mungkin belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk mengatasi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Hal ini dapat meningkatkan risiko konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan aspek psikologis ini, mungkin dengan melibatkan ahli psikologi dalam proses pengambilan keputusan.

Isu perlindungan anak juga berkaitan erat dengan hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dalam konteks dispensasi kawin, penting untuk memastikan bahwa suara dan pendapat anak benar-benar didengar dan dipertimbangkan. Pengadilan Agama harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, tanpa tekanan atau manipulasi dari pihak manapun. Dampak sosial dari perkawinan usia dini juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin. Pasangan yang menikah muda mungkin mengalami isolasi sosial, kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, dan menghadapi stigma dari masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan aspek sosial ini dan bagaimana perkawinan usia dini dapat mempengaruhi integrasi pasangan dalam masyarakat.

Isu pendidikan seks dan kesehatan reproduksi juga berkaitan erat dengan dispensasi kawin. Seringkali, pasangan muda yang mengajukan dispensasi kawin memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi dan tanggung jawab dalam hubungan seksual. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual. Pengadilan Agama mungkin perlu mempertimbangkan untuk mewajibkan pasangan yang mengajukan dispensasi kawin untuk mengikuti program edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Aspek hukum lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam pemberian dispensasi kawin. Penting untuk memastikan bahwa ada standar yang jelas dan konsisten dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak terjadi disparitas yang signifikan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan Agama perlu mengembangkan pedoman yang jelas untuk menilai permohonan dispensasi kawin, sambil tetap memberikan ruang untuk pertimbangan kasus per kasus.

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam konteks dispensasi kawin. Lembaga-lembaga ini dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum, melakukan advokasi untuk pencegahan perkawinan usia dini, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini. Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan lembaga- lembaga ini dalam upaya mencegah dan menangani isu perkawinan usia dini secara lebih komprehensif. Aspek monitoring dan evaluasi juga penting dalam pelaksanaan dispensasi kawin. Perlu ada mekanisme untuk memantau dampak jangka panjang dari pemberian dispensasi kawin, baik terhadap pasangan yang bersangkutan maupun terhadap anak-anak mereka. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan. Pengadilan Agama mungkin perlu mempertimbangkan untuk melakukan studi longitudinal terhadap pasangan yang telah diberikan dispensasi kawin. Isu penegakan hukum juga menjadi sorotan dalam konteks dispensasi kawin. Meskipun ada batasan usia minimal untuk menikah, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang perlu ditutup. Pengadilan Agama mungkin perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang benar-benar ditegakkan.

Aspek pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan isu dispensasi kawin. Perkawinan yang dilakukan tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama seringkali tidak dicatatkan secara resmi, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hal ini dapat berdampak negatif pada hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan aspek ini dan mungkin perlu berkoordinasi dengan lembaga pencatatan perkawinan untuk memastikan bahwa semua perkawinan, termasuk yang melalui proses dispensasi, dicatatkan secara resmi. Isu trafficking dan eksploitasi anak juga tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai dispensasi kawin. Ada kekhawatiran bahwa dispensasi kawin dapat disalahgunakan sebagai kedok untuk melegalkan praktik trafficking atau eksploitasi anak. Pengadilan Agama harus sangat waspada terhadap kemungkinan ini dan melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan atau eksploitasi dalam permohonan dispensasi kawin. Aspek psikososial dari perkawinan usia dini juga perlu mendapat perhatian khusus. Pasangan yang menikah di usia muda mungkin mengalami tekanan psikologis yang berat karena harus mengambil tanggung jawab orang dewasa sebelum mereka siap secara mental. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dan kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat. Pengadilan Agama mungkin perlu mempertimbangkan untuk melibatkan konselor perkawinan atau psikolog dalam proses pemberian dispensasi kawin.

Masalah perkawinan usia anak terus dibahas di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan telah ditetapkan juga syarat-syarat mengenai ketentuan batas umur minimal tersebut oleh Undang-undang perkawinan terdapat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.Setelah keputusan untuk menaikkan usia minimal perkawinan dalam perubahan Undang-undang Perkawinan. Anak-anak yang belum mencapai usia 19 tahun harus melalui prosedur yaitu harus mengajukan dispensasi kawin dan melewati tahap sidang pengadilan hingga hakim membuat keputusan sebelum mereka dapat melakukan perkawinan.Di Pengadilan Agama kota Tegal sendiri dalam mengambil keputusan untuk permohonan dispensasi kawin berpedoman pada PERMA NO 5 TAHUN 2019 dan melihat alasan pemohon pada saat persidangan.Sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, dengan asas monogami. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.Perkawinan juga dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Ini menghasilkan hak dan kewajiban yang berlaku antara suami dan istri, serta keturunan yang akan datang.[[8]](#footnote-8) Perkawinan adalah ikatan sah jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita.[[9]](#footnote-9) Undang-undang Indonesia menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini hanya memiliki 1 (satu) Pasal yang mengubah Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia minimal perkawinan di Indonesia dibatasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan hak-hak anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, untuk tumbuh secara optimal hingga mencapai usia perkawinan. Oleh karena itu, ketika anak mencapai usia perkawinan, diharapkan mereka sudah siap untuk memimpin rumah tangga dan melanjutkan perjalanan hidup mereka sendiri.Perkawinan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia dua puluh tahun yang belum siap untuk menikah disebut perkawinan usia anak. Namun, berdasarkan aturan yang terus diperbarui di Indonesia, situasi masyarakat saat ini sangat berbeda.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, termasuk kedalam usia anak.12 Jadi, Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali mengatur bahwa anak-anak yang belum mencapai usia minimal perkawinan (Ayat 1) dapat dinikahkan dengan dispensasi kawin. Menurut ayat tersebut, orang tua calon pengantin pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, didukung oleh bukti yang memadai, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia seperti yang disebutkan dalam Ayat (1).Jika calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, pasal-pasal tersebut memberikan solusi. Keputusan administratif yang dibuat oleh negara untuk membebaskan suatu tindakan dari ketentuan peraturan yang sebelumnya melarang tindakan tersebut dikenal sebagai Dispensasi.[[10]](#footnote-10)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, menjadi suami atau istri. Sementara itu, dispensasi berarti "pengecualian dari aturan karena pertimbangan khusus, pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu".[[11]](#footnote-11) Dengan demikian, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pemberian keringanan kepada seseorang yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur oleh Undang-undang. Warga negara Muslim yang ingin menikah tetapi masih berusia di bawah batas yang ditetapkan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).[[12]](#footnote-12) Pengadilan agama adalah pengadilan khusus dalam hal perkara-perkara tertentu bagi warga Indonesia yang memeluk agama Islam.[[13]](#footnote-13) Jika dibandingkan dengan tugas dan wewenang peradilan umum Pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas, karena secara administratif, organisator, dan finansial, peradilan ini berada dibawaah kekuasaan Departemen Agama Republik Indonesia sedangkan secara teknis operasional adalah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.[[14]](#footnote-14)

Dispensasi perkawinan dapat diberikan apabila terdapatalasan yang mendesak yang telah ditegaskan dalam Undang-undang yang mengatur tentang dispensasi pernikahan yaitu pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan yang mendesak tersebut adalah dimana keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan sebuah perkawinan. Alasan-alasan tersebut harus terdapat bukti-bukti pendukung yang cukup dimana bukti-bukti tersebut adalahsurat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksankan dan surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama memberikan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.peran hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan dispensasi harus dipertimbangkan secara bersamaan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL”**

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

* 1. Apa alasan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Tegal?
  2. Bagaimana solusi pencegahan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tegal?

### Tujuan Penelitian

* 1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Tegal.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi pencegahan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tegal.

### Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian atau kebaruan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Tegal dalam mencegah dan mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia dan mengapa anak dibawa umur mengajukan dispensasi perkawinan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dispensasi perkawinan dibawah umur dan program yang lebih komprehensif dan terpadu untuk melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan, dari dampak negatif perkawinan anak.

### Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkatUntuk menambah referensi dalam penelitian. Judul skripsi yang penulis jadikan tambahan referensi diantaranya yaitu:

1. “Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”-Nur Iman 2021.[[15]](#footnote-15) Dalam skripsi ini penulis membahas implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kabupatern Brebes dan faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” - Kholilurrachman 2021.[[16]](#footnote-16) Pada skripsi ini penulis meneliti Praktik Dispensasi Nikah Anak diBawah Umur Pasca Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)”-Rohmat Saripudin 2019.[[17]](#footnote-17) Dalam skripsi ini penulis membahas faktor penyebab dispensasi kawin, prosedur pengajuan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan salah satu perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang.

Pada penelitian ini Peneliti ingin menelisik lebih dalam mengapa dispensasi perkawinan usia anakbisa terjadi dan bagaimana solusi pencegahan dispensasi perkawinan usia anak khususnya di wilayah kota Tegal.

### Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang untuk mendapatkan data terkait yaitu dispensasi perkawinan di bawah umur di Kota Tegal dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (*Library Research)*sebagai pendukung penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris,yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dilakukan secara langsung di lapangan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologis untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

### Data Penelitian

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

* + 1. Data Primer

Data yang didapatkan di lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang diteliti. Data ini bersumber dari Pengadilan Agama Kota Tegal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu wawancara dengan Hakim yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini, termasuk sejumlah data mengenai permasalahan dalam penelitian, fakta atau keterangan yang di peroleh berkaitan dengan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Tegal.

* + 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

* + - 1. Bahan Hukum Primer
         * Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
         * Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002.
         * Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
      2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang penelitian nonhukum dan jurnal- jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.[[18]](#footnote-18) Bahan hukum sekunder juga yang memberikan penjelesaian mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan perUndang-undangan, artikel ilmiah, jurnal nasional, jurnal internasional, hasil penelitian, hasil dari karangan buku, materi yang di sampaikan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

* + - 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini yang memberikan pentuk maupun penjelesan dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahan dari internet, karangan buku, ensiklopedia, dan seterusnya.

### Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

* + 1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan dan fakta data langsung yang ada di lokasi penelitianyang digunakan untuk menghimpun data penelitian.

* + 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dengan sumber data atau tanya jawab. Bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan penelitian secara baik,pertanyaan-pertanyaan yang ada diajukan. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancarakepada ibu hakim sebagai narasumber yaitu Ibu Wafda Husnul Mukhiffa, Lc yang bertugas di Pengadilan Agama Tegal Kelas 1A.

* + 1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari hasil lapangan, berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian

### Metode Analisis Data

Penulis akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini. mengolah secara kualitatif normatifsemua data yang didapat dari hasil dokumentasi, yaitu dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan, lalu menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus. Pertama-tama bahan hukum akan dianalisis dan dievaluasi lalu dibuat kesimpulan dengan mengikuti analisis teks dan data hukum. menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke khusus dengan menggunakan metode deduktif.[[19]](#footnote-19)

### Rencana Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Konseptual. Berisi uraian teoritis atau kajian teoritis tentang Dispensasi pekawinan usia anak menurut UU No. 16 Tahun 2019.
3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi pembahasan dari rumusan masalah mengenai Dispensasi perkawinan usia anak menurut UU No. 16 Tahun 2019.
4. BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi kristalisasi dari semua rumusan masalah yang telah dijawab dan berupa simpulan dan saran.

## BAB II

## TINJAUAN KONSEPTUAL

### Landasan Teori

### Pernikahan

Ketika kita membahas pernikahan maka kita bisa memeriksanya dari berbagai sisi. Pernikahan adalah permintaan yang ketat. Mulai dari sini, jadi ketika individu menikah pada saat yang sama dia tidak seolah-olah ingin memenuhi kebutuhannya secara organik, itu adalah sesuatu yang khas untuk dilakukan secara terdistribusi. Seperti halnya berbagai kebutuhan lain dalam hidup ini, kebutuhan alamiah yang sejati juga harus dipenuhi. Islam juga telah menetapkan bahwa cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan alami manusia hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat menarik jika kita lebih fokus pada makna penting dari permasalahan pernikahan ini.

Pada Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa pernikahan juga diyakini membawa keharmonisan dalam hidup seseorang. Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan sebenarnya bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, namun lebih dari itu, perkawinan juga mendorong keharmonisan hidup bagi setiap individu sehingga dapat tercipta surga dunia di dalamnya. Hal-hal tersebut akan terjadi jika perkawinan benar-benar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku saat ini. Istilah nikah berasal dari bahasa

Arab, yaitu *annikaaha,* ada yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqih adalah menggunakan kata nikah dan kata zawaj. Padahal menurut istilah bahasa Indonesia, itu adalah perkawinan. Saat ini, sering kali ada perbedaan antara: pernikahan dan perkawinan, namun tetap saja pada tingkat fundamental, pernikahan dan perkawinan hanyalah perbedaan dalam hal dasar kata. Menurut Islam, dasar hukum pernikahan terdapat didalam Al-Quran QS Al-Hujurat ayat 13 yang mengandung makna tentang persamaan mendasar umat manusia, pentingnya keberagaman dalam mengenal satu sama lain, dan menjabarkan ketaqwaan sebagai bagian utama dari kecemerlangan dalam melihat Allah. Hal ini mendesak umat manusia untuk menghargai perbedaan, fokus pada kualitas dan ketaatan yang mendalam, dan memahami bahwa keputusan Allah bergantung pada pemahaman dan informasi ideal-Nya.[[20]](#footnote-20)

Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya seperti dalam hadits Nabi riwayat Abu Daud yang mngandung makna bahwa meski kekayaan, keturunan, dan kecantikan adalah faktor-faktor yang bisa dianggap sebagai faktor penentu dalam memilih pasangan, namun yang penting dan harus menjadi perhatian utama adalah agama. Pernikahan orang yang beragama baik akan memberikan kekuatan yang besar bagi kepuasan dan keberuntungan dalam pernikahan. Hal ini karena agama berdampak pada aktivitas individu serta membentuk karakter dan aturan hidup yang akan menambah persahabatan dan kepuasan keluarga.[[21]](#footnote-21)

Maka dari hadis ini, memilih pasangan dalam agama adalah yang pertama dan lebih utama, Hadits ini menggarisbawahi bahwa memilih pasangan dalam kehidupan sehari-hari karena agama atau pengabdiannya adalah keputusan yang paling ideal untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini karena pasangan yang tegas pada umumnya akan memahami kewajibannya dengan lebih baik, lebih toleran, dan mempunyai keutamaan yang besar. Selain Kekokohan dan Kesesuaian. Keluarga, pasangan yang agamanya baik mempunyai pribadi yang lebih mantap dan bermoral, hal ini penting untuk menciptakan iklim keluarga yang nyaman dan secara umum kuat. Agama yang agung akan mengarahkan aktivitas dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari, membatasi perjuangan, dan meningkatkan keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya menjadi penolong dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan yang baik dan tegas juga akan merasa lebih mudah menjalani kehidupan sehari-hari karena standar yang ketat, seperti cinta, komitmen, dan kesetaraan. Hal ini penting untuk membentuk ikatan keluarga yang solid dan saling menguntungkan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ritual atau formalitas belaka, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki makna mendalam dan tujuan mulia. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Melalui pernikahan, sepasang suami istri dapat saling melengkapi, mendukung, dan membantu satu sama lain dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks masyarakat modern, pernikahan sering kali dianggap sebagai hal yang rumit dan menakutkan, terutama bagi kaum muda. Banyak yang merasa belum siap secara mental maupun finansial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, Islam mengajarkan bahwa pernikahan justru dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial dan moral yang sering terjadi di kalangan muda. Dengan menikah, seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina dan maksiat lainnya, serta dapat lebih fokus dalam mengembangkan diri dan beribadah kepada Allah SWT.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam adalah konsep kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Meskipun keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri adalah mitra yang sederajat dalam membangun rumah tangga. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi istri dan anak-anaknya, sementara istri berperan sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga. Namun, keduanya harus saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran masing-masing.

Pendidikan anak menjadi salah satu fokus utama dalam pernikahan Islam. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka agar menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, keteladanan orang tua memegang peranan penting. Suami istri harus mampu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam hal ibadah, akhlak, dan perilaku sehari-hari. Komunikasi yang baik antara suami dan istri juga menjadi kunci keharmonisan rumah tangga dalam Islam. Pasangan suami istri dianjurkan untuk selalu berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam segala aspek kehidupan. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul dalam rumah tangga.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya saling memaafkan dan berlapang dada dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam perjalanan rumah tangganya. Namun, dengan kesabaran, keikhlasan, dan kemauan untuk saling memaafkan, pasangan dapat melewati berbagai rintangan dan memperkuat ikatan pernikahan mereka. Dalam hal ekonomi, Islam mengajarkan pentingnya sikap qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Pasangan suami istri dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam hal materi. Mereka harus mampu mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana, menghindari hutang yang tidak perlu, dan selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT. Sikap qana'ah ini dapat membantu pasangan untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan, seperti ibadah dan pendidikan anak, daripada terjebak dalam gaya hidup materialistis.

Pernikahan dalam Islam juga tidak lepas dari konsep tolong-menolong dalam kebaikan. Pasangan suami istri diharapkan dapat saling mendukung dalam melakukan amal saleh dan dakwah. Mereka dapat bekerja sama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti mengajar di majelis taklim, membantu kaum dhuafa, atau aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bermanfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, pasangan Muslim juga dituntut untuk bijak dalam memanfaatkan berbagai kemajuan yang ada. Misalnya, dalam penggunaan media sosial dan internet, pasangan harus mampu menjaga batasan-batasan syariat dan tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merusak rumah tangga. Mereka juga harus mampu memfilter berbagai informasi yang masuk dan memilah mana yang bermanfaat dan mana yang dapat membahayakan keimanan dan keutuhan keluarga. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menjadi tujuan utama dalam pernikahan Islam. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang. Untuk mencapai kondisi ini, pasangan suami istri harus terus-menerus berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, saling mendoakan, dan bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.

Pada konteks kehidupan modern, di mana tingkat perceraian cenderung meningkat, pasangan Muslim harus memahami bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan dengan mudah. Islam memang memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir jika memang tidak ada lagi jalan keluar, namun hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pasangan harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga mereka dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Peran keluarga besar juga tidak boleh diabaikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Meskipun Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang independen, namun dukungan dan nasihat dari orang tua dan keluarga besar dapat menjadi faktor penting dalam membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Pasangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kemandirian mereka sebagai suami istri dengan tetap menghormati dan menjaga silaturahmi dengan keluarga besar. Dalam hal pengasuhan anak, Islam mengajarkan pentingnya memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan zaman, namun juga harus memiliki pondasi keimanan yang kuat.

Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak- anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah maupun di rumah. Konsep keberkahan dalam rumah tangga juga menjadi hal yang penting dalam pernikahan Islam. Pasangan suami istri harus selalu berusaha untuk mendatangkan keberkahan dalam kehidupan mereka dengan cara menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Mereka harus memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari cara mencari nafkah hingga pola konsumsi, selalu sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, mereka dapat berharap mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Untuk menghadapi konflik rumah tangga, Islam mengajarkan pentingnya bersikap dewasa dan bijaksana. Pasangan harus menghindari sikap egois dan selalu berusaha untuk melihat permasalahan dari sudut pandang pasangannya. Mereka juga harus belajar untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan amarah menguasai diri mereka. Jika diperlukan, pasangan dapat meminta bantuan mediator atau konselor pernikahan yang memahami nilai-nilai Islam untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam konteks masyarakat yang semakin plural, pasangan Muslim juga dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) melalui perilaku dan sikap mereka sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang lebih luas.

Peran teknologi dalam kehidupan rumah tangga juga tidak bisa diabaikan. Pasangan Muslim harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif untuk mendukung kehidupan rumah tangga mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang membantu dalam mengelola keuangan keluarga, merencanakan ibadah bersama, atau belajar ilmu agama. Namun, mereka juga harus waspada terhadap dampak negatif teknologi, seperti kecanduan gadget atau paparan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, pasangan Muslim juga dituntut untuk kreatif dan inovatif. Mereka dapat mengembangkan usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri secara ekonomi. Namun, dalam mengejar kesuksesan ekonomi, pasangan harus tetap menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Akhirnya, pernikahan dalam Islam harus dipahami sebagai sebuah perjalanan spiritual bersama menuju ridha Allah SWT. Pasangan suami istri harus selalu menyadari bahwa tujuan akhir dari kehidupan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan rumah tangga, karena mereka menyadari bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari proses pendewasaan diri dan peningkatan kualitas keimanan mereka.

Demikianlah beberapa aspek penting dalam pernikahan Islam yang perlu dipahami dan dijalani oleh setiap pasangan Muslim. Dengan berpegang teguh pada ajaran- ajaran Islam dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, pasangan dapat berharap untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Menurut Islam, pernikahan juga mempunyai syarat, landasan, dan alasan pernikahan itu sendiri. Adapun syarat-syarat calon suami/istri adalah sebagai berikut: Islam, tidak menjadi mahram bersama istri yang dikandung, tidak dalam rangka haji atau umrah, sukarela (tidak sah bilamana dipaksa), mengetahui halalnya penjaga akad nikah, menyadari bahwa wanita itu bisa dan sah menikah, tidak boleh mempunyai empat istri sah sekaligus. Maka syarat calon suami islam, tidak dalam pikiran Idah, tidak dalam pikiran haji atau umrah, bersedia (tidak dibatasi, kecuali remaja putri), tidak ada mahram wanita yang mempunyai calon suaminya, bukan pasangannya atau masih punya suami. Syarat akad nikah yang kedua adalah adanya wali. Syarat-syarat seorang wali antara lain harus bersikap adil, islami, berpengalaman, laki-laki, merdeka, tidak munkar, tidak kafir dan tidak murtad, tidak berakal haji atau umrah, berakal, tidak lemah otak atau gila, dengan kemauannya sendiri. kesiapan dan tidak paksaan serta tidak bersifat misterius dan tidak mempunyai penguasaan atas harta bendanya.

Selain itu ada saksi, syarat seorang saksi antara lain beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, maju, adil, bebas, minimal dua orang, menguasai pokok-pokok cara menyatakan ijab dan qabul, siap mendengar, melihat dan berbicara (tidak tunanetra, bodoh). atau tuli), adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak melanjutkan melakukan dosa kecil), bukan wali. (Misalnya, saudara laki-laki yang sendirian). Katakanlah terdapat seorang bapak saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkawinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkawinan itu tidak sah karena dia disangka orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

Syarat-syarat Penting Shigat Ijab Qabul Agar terjadi suatu akad yang mempunyai akibat yang halal bagi sepasang suami istri, harus dipenuhi syarat-syarat yang menyertainya, kedua pelaku mempunyai tamyiz, ijab qabulnya dalam satu majlis, maksudnya sembari mengucapkan ijab qabul tidak boleh disebarkan dengan kata lain, atau menurut adat dianggap ada jeda yang menghalangi pelaksanaan upacara pernikahan.[[22]](#footnote-22) Lalu, poin penting juga didalam akad nikahyaitu rukun nikah melputi pengantin laki- laki (calon pasangan) dan seorang wanita (calon istri) yang tidak dihalangi dan dibatasi oleh syariat untuk menikah, di antara hal-hal syariah yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, misalnya orang yang akan dijodohkan oleh laki-laki. laki-laki karena asuh silang atau asuh dada. Atau lagi wanita tersebut sedang dalam masa iddah dan lain-lain. Hambatan lainnya adalah apabila pihak laki-laki kafir, sedangkan wanita yang akan dinikahinya adalah wanita muslim, wali, saksi, ijab dan qabul (akad nikah), ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.

Individu yang menikah seharusnya tidak hanya bermaksud untuk memuaskan hasrat mereka, serupa dengan tujuan sebagian besar orang saat ini. Untuk menambah jumlah kerabat orang-orang ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya "Menikahlah wanita- wanita yang memuja dan matang, karena (Saat tibanya Hari Kiamat) aku akan pamerkan jumlah yang sangat besar sebelum yang lain." Melindungi aurat dan alat reproduksi pasangannya, merendahkan penampilan dan penampilan pasangannya dari hal-hal yang haram. Jadi dari gambaran di atas, pernikahan dalam islam adalah mengikuti perkembangan zaman manusia, menjaga kehormatan dengan mengalihkan kebutuhan fitrah sesuai syariat, kerjasama suami istri dalam mendidik dan benar-benar fokus pada anak, mengurus keluarga. dalam partisipasi yang bermanfaat dengan berfokus pada kebebasan dan komitmen.

### Pernikahan Dini terkait Batas Umur Perkawinan menurut Hukum

Agama Islam mengartikan perkawinan sebagai struktur utama kehidupan berdua yang disyariatkan untuk diciptakan dalam tatanan keluarga. Alasan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah untuk membentuk suatu keluarga, bahagia dan abadi dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pasangan calon harus telah mengembangkan jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, memahami dengan baik tujuan perkawinan tanpa harus mengakhiri perkawinan. berangkat dengan terpisah dan mendapatkan keturunan yang hebat dan sehat. [[23]](#footnote-23) Berkenaan dengan aturan ini, salah satu pedoman yang digunakan adalah menentukan waktu perkawinan.[[24]](#footnote-24)

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), upaya pembinaan dilaksanakan dengan batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang dapat menikah. Batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun bagi calon perempuan dan laki-laki yang akan menjadi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Meskipun batasan usia telah ditetapkan, namun masih terdapat penyimpangan dalam melakukan perkawinan di bawah umur tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan standar dan tata cara perkawinan yang diilustrasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan tersebut, Peraturan Nomor 1 Pedoman Perkawinan Tahun 1974 memberikan jawabannya sebagai administrasi dari pengadilan. Adanya pengaturan- pengaturan dalam Peraturan Perkawinan menimbulkan pemahaman bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diandalkan dengan pengaturan-pengaturan mengenai sejauh mungkin perkawinan. Berdasarkan Unified Countries Advance Monetary and Party (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah hubungan usia dini terbesar di dunia pada tahun 2007. Untuk tingkat ASEAN, tingkat Pernikahan Dini di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah kamboja.

Berdasarkan Riskesdas 2010, remaja putri di Indonesia berusia 10- 14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 remaja putri berusia 10-14 tahun di Indonesia menikah. Jumlah remaja putri berusia 15- 19 tahun yang menikah lebih banyak dibandingkan remaja putra berusia 15- 19 tahun (11,7% perempuan dan 1,6% remaja putra berusia 15-19 tahun). Selain itu, jumlah terminasi dini di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta setiap tahunnya. Sekitar 750.000 di antaranya dilakukan oleh anak-anak muda.[[25]](#footnote-25) 103 Kasus Pernikahan di usia muda bukanlah hal baru di Indonesia. Mahkamah Agung (MK) baru-baru ini menolak penambahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal ini mendapat tentangan dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk para aktivis yang fokus pada kebebasan anak-anak di organisasi aliansi 18+ dan Perusahaan Kesejahteraan Wanita (YKP). Sebagai kandidat, mereka berteriak menolak pilihan tersebut, mengingat Indonesia saat ini sedang krisis kasus pernikahan anak. Mereka mengaku menikah Anak di bawah umur memang menghambat perempuan, baik dari segi sosial, finansial, maupun mental.

Berkaitan dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara khusus: Perkawinan adalah suatu hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki apalagi seorang perempuan sebagai pasangan dengan alasan membangun keluarga yang bahagia ( keluarga). kekal dalam terang Ketuhanan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Majelis Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa perkawinan menurut syariat Islam adalah perkawinan yang merupakan akad khusus atau mīṫ āqan galīḍan untuk menaati perintah Allah dan menyempurnakannya adalah cinta.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memberikan manfaat kemampuan untuk mempunyai hubungan kekeluargaan (pasangan) antar manusia dan memberikan bantuan bersama serta membatasi hak-hak istimewa pemilik dan memenuhi komitmen individu.[[26]](#footnote-26) Definisi ini menunjukkan adanya keistimewaan dan komitmen yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan bukan hanya sekedar membatasi hubungan suami-istri (senggama), namun setelah terjadi kesepakatan, tetap ada keistimewaan dan komitmen yang harus diselesaikan. Pernikahan dini masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tradisi budaya, tekanan ekonomi, hingga kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Salah satu dampak serius dari pernikahan dini adalah terganggunya kesehatan reproduksi remaja, terutama bagi perempuan. Kehamilan pada usia muda dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta berpotensi membahayakan nyawa ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga sering kali mengakibatkan putusnya pendidikan anak, terutama bagi anak perempuan. Hal ini dapat membatasi peluang mereka untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

Dari segi psikologis, pasangan yang menikah di usia dini seringkali belum siap menghadapi tanggung jawab dan tekanan dalam rumah tangga. Mereka mungkin belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk mengelola konflik dan membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berumah tangga. Akibatnya, pernikahan dini memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih matang

Upaya untuk mencegah pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Peran pendidikan sangat krusial dalam mencegah pernikahan dini. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, anak-anak dapat memiliki lebih banyak pilihan dan peluang di masa depan. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, hak- hak anak, dan pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program-program pemberdayaan ekonomi juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, diharapkan orang tua tidak terpaksa menikahkan anak mereka di usia dini karena alasan ekonomi.

Di sisi lain, penegakan hukum terkait batas usia pernikahan juga perlu diperketat. Petugas pencatat pernikahan, baik di KUA maupun kantor catatan sipil, harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen dan memastikan bahwa calon pengantin telah memenuhi syarat usia minimal untuk menikah. Sanksi yang tegas juga perlu diberlakukan bagi pihak-pihak yang memfasilitasi atau melakukan pemalsuan dokumen untuk memungkinkan pernikahan di bawah umur. Pada konteks agama Islam, perlu adanya reinterpretasi terhadap pemahaman tentang pernikahan dini. Meskipun ada hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah RA pada usia muda, namun konteks sosial dan budaya pada masa itu sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Para ulama dan tokoh agama perlu memberikan penjelasan yang komprehensif tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam pernikahan, serta menekankan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Peran media massa dan media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kampanye-kampanye edukasi melalui berbagai platform media dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, media juga dapat berperan dalam mengubah persepsi masyarakat tentang nilai anak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Konseling pranikah juga perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauannya. Bagi pasangan yang hendak menikah, terutama yang masih berusia muda, konseling pranikah dapat membantu mereka memahami tanggung jawab dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Konseling ini juga dapat menjadi sarana untuk mendeteksi dan mencegah pernikahan dini yang mungkin terjadi karena paksaan atau alasan-alasan yang tidak tepat. Dalam hal kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang perkawinan, terutama terkait batas usia minimal untuk menikah. Beberapa negara telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun tanpa pengecualian, sesuai dengan rekomendasi dari berbagai organisasi internasional. Namun, perubahan undang-undang saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

Program-program pendidikan seksual komprehensif juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, remaja diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait hubungan dan pernikahan. Pendidikan seksual yang komprehensif juga dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Pemberdayaan perempuan menjadi aspek penting lainnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, perempuan dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam masyarakat. Hal ini pada gilirannya dapat membantu mengurangi praktik-praktik yang merugikan perempuan, termasuk pernikahan dini. Perlindungan anak juga perlu diperkuat, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadinya pernikahan dini. Lembaga perlindungan anak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah kasus-kasus pernikahan dini. Mereka juga perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang memaksa atau memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur.

Pada konteks budaya, perlu adanya dialog yang intensif dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk mengubah persepsi tentang pernikahan dini. Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki tradisi menikahkan anak di usia muda, dengan alasan budaya atau kepercayaan tertentu. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal namun tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak perlu dilakukan untuk mengubah praktik-praktik tersebut. Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Orang tua perlu diedukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program-program parenting yang fokus pada perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini perlu digalakkan di tingkat masyarakat. Kerja sama internasional juga diperlukan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara signifikan. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan komunitas internasional dapat membantu memperkuat upaya-upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia.Penelitian dan pengumpulan data yang akurat tentang pernikahan dini juga perlu ditingkatkan. Data yang komprehensif dan terkini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan faktor-faktor pelindung yang berkaitan dengan pernikahan dini di berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

Pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi aspek penting dalam pencegahan pernikahan dini. Banyak kasus pernikahan dini terjadi karena alasan ekonomi, di mana orang tua merasa terbebani secara finansial dan memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Program-program pengentasan kemiskinan, pemberian beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang seringkali menjadi pemicu pernikahan dini. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga penting dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Remaja perlu memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, termasuk konseling dan akses terhadap alat kontrasepsi. Hal ini dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja, yang seringkali berujung pada pernikahan dini. Dalam ranah hukum, perlu adanya harmonisasi antara undang-undang perkawinan dengan undang- undang perlindungan anak.

Beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan yang masih memberi celah untuk terjadinya pernikahan di bawah umur perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan semangat perlindungan anak. Selain itu, mekanisme dispensasi untuk pernikahan di bawah umur juga perlu diperketat dan dibatasi hanya untuk kasus-kasus yang benar-benar mendesak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Peran lembaga keagamaan juga perlu diperkuat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia. Mereka dapat berperan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang pernikahan dalam konteks agama, termasuk pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam pernikahan. Lembaga-lembaga keagamaan juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini. Akhirnya, perlu disadari bahwa pencegahan pernikahan dini adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Perubahan sosial dan budaya tidak terjadi dalam semalam, namun dengan upaya yang konsisten dan komprehensif, Indonesia dapat berharap untuk mengurangi angka pernikahan dini secara signifikan di masa depan.

### Proses Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Sejatinya pernikahan adalah masalah mendasar bagi keberadaan manusia.. Karena selain pernikahan yang merupakan suatu cara untuk membingkai sebuah keluarga, maka pernikahan tidak hanya sekedar mengatur unsur-unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan kekerabatan, pernikahan juga mengandung unsur- unsur kesucian, khususnya hubungan manusia dengan Tuhannya.[[27]](#footnote-27)

Alasan ditetapkannya sejauh-jauhnya untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk memahami tujuan perkawinan itu sendiri, khususnya untuk membentuk keluarga yang bahagia pula, kekal tanpa berakhir dengan perpisahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedapat- dapatnya melangsungkan Perkawinan terhadap seseorang yang belum sampai pada umur 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, bagi laki-laki atau perempuan yang telah menginjak usia 21 tahun, tidak boleh ada persetujuan orang tua untuk terjadinya perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memerlukan persetujuan orang tua untuk menikah adalah laki-laki yang telah sampai pada umur 19 tahun. Lebih lanjut, dalam Peraturan Perkawinan juga mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan jaminan keabsahan perkawinan antara pasangan calon istri dan calon suami, baik yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sekiranya setelah 45 tahun lamanya Undang-UndangNo 1 Tahun 1974 sebagai dasar dari perkawinan dalam hukum nasional, akhirnya mengalami perubahan, hal prinsip perubahan dalam Undang- UndangPerkawinan ini nampaknya guna menunaikan putusan Mahkamah Konstitusi No 22 Undang-Undang XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Atas adanya penyimpangan dari ayat 1 pasal ini, dapat dimintakan pengaturannya kepada pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh wali laki-laki maupun wali perempuan samping." Permohonan jatah nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun. Pasangan tersebut diajukan oleh wali baik laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.[[28]](#footnote-28) Permohonan pengurusan perkawinan tidak diberikan begitu saja tanpa izin yang sah. Penjelasannya namun juga memerlukan perenungan terhadap hal-hal tertentu yang diharapkan dapat memahami tujuan pernikahan itu sendiri. Pemberlakuan undang-undang perkawinan di bawah umur saat ini bukanlah sesuatu yang aneh, mengingat kerjasama sosial yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini, khususnya dalam rangka menjalin hubungan dekat disebut dengan pacaran, yang hasilnya adalah pacaran. melakukan perselingkuhan layaknya sepasang suami istri, dan mengenai hal itu hingga hamil tanpa kehadiran ayah dan ibu, akibatnya menyembunyikan aib wali dilakukan secara pernikahan tanpa memandang usia dan masa depan.

Perkembangan seorang individu menentukan cara hidup dan perasaan terikatnya, dimana tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul kemudian. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan oleh pihak- pihak yang bersangkutan untuk menikah terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi ketika mereka menikah tidak dilihat dari status fisik dan mentalnya. Dimana masa pubertas merupakan usia yang sepenuhnya lemah, tingkat perkembangan ilmu otaknya masih goyah dan sering muncul keresahan pribadi. Hal ini ditakutkan mengingat perkawinan masih terpaksa terjadi, sehingga dapat menyebabkan tidak adanya perkawinan. Keharmonisan dalam keluarga, yang lebih buruk lagi, dapat menyebabkan perpisahan karena tingkat logika yang masih goyah dan penuh perasaan. Prestasi keluarga tidak ditentukan oleh perkembangan mendalam dari kedua pasangan.

Dispensasi kawin memang menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, pemberian dispensasi kawin dapat dilihat sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi situasi-situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau alasan-alasan sosial budaya tertentu. Namun di sisi lain, praktik ini juga dapat dianggap sebagai celah hukum yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis mereka. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim dihadapkan pada dilema yang tidak mudah. Mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan yang terpenting, kepentingan terbaik anak. Proses pengambilan keputusan ini memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kesiapan fisik dan mental calon pengantin, latar belakang pengajuan permohonan, serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kehidupan anak. Salah satu faktor yang sering menjadi pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, pernikahandini seringkali dianggap sebagai solusi untuk "menyelamatkan" nama baik keluarga dan memberikan status hukum pada anak yang akan lahir.

Namun, pendekatan ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru. Pasangan yang menikah karena terpaksa oleh keadaan mungkin belum siap secara mental dan finansial untuk membangun rumah tangga dan membesarkan anak. Hal ini dapat berujung pada berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini, pengadilan dan pihak-pihak terkait perlu mempertimbangkan alternatif lain selain pernikahan dini. Misalnya, memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga yang mengalami kehamilan remaja, memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi calon orang tua muda. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan dapat melindungi kepentingan anak yang akan lahir tanpa harus mengorbankan masa depan orang tua yang masih remaja.

Aspek budaya juga sering menjadi faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin. Di beberapa daerah di Indonesia, menikahkan anak di usia muda masih dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Dalam situasi seperti ini, hakim harus berhati-hati dalam menimbang antara menghormati nilai-nilai budaya setempat dan melindungi hak-hak anak. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya namun tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak perlu dikembangkan. Salah satu solusi yang mungkin dapat diterapkan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemuka agama dalam proses mediasi sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus mengorbankan masa depan anak. Misalnya, dengan menunda pernikahan hingga anak mencapai usia yang lebih matang, namun tetap menjaga komitmen antara kedua keluarga melalui pertunangan adat atau cara-cara lain yang sesuai dengan budaya setempat. Pendidikan juga memegang peranan kunci dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini dan pengajuan dispensasi kawin. Masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak muda, perlu diedukasi tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Program-program pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kehamilan remaja yang seringkali menjadi pemicu pernikahan dini.

Pada konteks hukum, perlu ada upaya untuk memperkuat implementasi undang-undang perkawinan yang baru. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perubahan ini tidak akan banyak berarti. Perlu ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini, termasuk bagi petugas pencatat perkawinan yang memfasilitasi pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi yang sah. Selain itu, proses pengajuan dan pemberian dispensasi kawin juga perlu diperketat. Hakim yang menangani kasus dispensasi kawin harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Mereka juga harus dibekali dengan keterampilan untuk melakukan assessment yang komprehensif terhadap kesiapan calon pengantin, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan. Pendapat ahli dari berbagai bidang ini dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, anak yang akan dinikahkan juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya, sesuai dengan prinsip partisipasi anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak.

Peran pemerintah daerah juga perlu diperkuat dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan pemberian dispensasi kawin. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang mendukung implementasi undang-undang perkawinan, serta mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi keluarga yang mau menunda pernikahan anak mereka hingga usia yang lebih matang, atau menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak- anak dari keluarga kurang mampu untuk mencegah putus sekolah yang seringkali menjadi pemicu pernikahan dini. Peran media massa dan media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan pengurangan kasus dispensasi kawin. Media dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini, serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan. Kampanye-kampanye sosial yang kreatif dan menarik perlu dikembangkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum muda.

Pada konteks yang lebih luas, upaya pencegahan pernikahan dini dan pengurangan kasus dispensasi kawin juga perlu dikaitkan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Seringkali, faktor ekonomi menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, diharapkan orang tua akan lebih mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka dan tidak terburu-buru menikahkan mereka di usia muda. Perlindungan anak juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks dispensasi kawin. Lembaga-lembaga perlindungan anak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, perlu dilibatkan dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Mereka dapat memberikan pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus ini, memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, serta memberikan alternatif solusi yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kerja sama internasional juga dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini dan pemberian dispensasi kawin. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara signifikan. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan komunitas internasional dapat membantu memperkuat upaya-upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

Penelitian dan pengumpulan data yang akurat tentang pernikahan dini dan dispensasi kawin juga perlu ditingkatkan. Data yang komprehensif dan terkini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi kasus dispensasi kawin. Penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi faktor- faktor risiko dan faktor-faktor pelindung yang berkaitan dengan pernikahan dini di berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia. Akhirnya, perlu disadari bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dan pengurangan kasus dispensasi kawin adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Perubahan sosial dan budaya tidak terjadi dalam semalam, namun dengan upaya yang konsisten dan komprehensif, Indonesia dapat berharap untuk mengurangi angka pernikahan dini dan kasus dispensasi kawin secara signifikan di masa depan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi kawin memang masih menjadi isu yang kompleks dan multi-dimensi. Di satu sisi, ia dapat dilihat sebagai upaya untuk mengakomodasi situasi-situasi khusus yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Namun di sisi lain, praktik ini juga berpotensi membuka celah bagi terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak yang belum siap untuk memasuki jenjang pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik anak dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin. Hakim, sebagai garda terdepan dalam proses ini, perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat membuat keputusan yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan anak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak terkait, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan, juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dispensasi kawin diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Pada akhirnya, upaya pencegahan pernikahan dini dan pengurangan kasus dispensasi kawin harus menjadi agenda bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum yang tegas, serta perubahan norma sosial dan budaya, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak, di mana mereka dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja mereka tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab pernikahan yang belum waktunya. Sehingga dari uraian di atas, adanya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum, melalui hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi Undang-Undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

### Pernikahan Dini Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui hal ini bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Perkembangan umur tidak seluruhnya ditentukan oleh tanda-tanda fisiknya, khususnya tanda-tanda pubertas secara keseluruhan dan lain-lain, umur yang paling tinggi bagi laki- laki adalah 15 (lima belas) tahun, iḥtilām bagi laki-laki dan siklus kewanitaan bagi perempuan adalah pada umur 9 (sembilan) tahun umur.[[29]](#footnote-29) Dengan memenuhi standar pubertas maka memungkinkan seseorang untuk menikah secara sempurna.[[30]](#footnote-30) Jadi perkembangan seseorang dalam Islam sering dikaitkan dengan pubertas.[[31]](#footnote-31) Dengan asumsi terdapat kelainan atau keterlambatan perkembangan fisik (alami), sehingga pada usia yang sebagian besar sudah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau keluar cairan kewanitaan bagi perempuan namun belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan, maka pada saat itu, Periode pubertas dimulai berdasarkan usia normal seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas. Awal masa remaja antara satu individu dan individu lainnya dipengaruhi oleh alam, kondisi lingkungan, dll..[[32]](#footnote-32)  Proporsi perkembangan yang diperkirakan dengan ukuran pubertas tidaklah kaku (relatif). Artinya menganggap penghindaran tentu sangat menekan bagi wanita yang dituju dan pria yang beruntung harus segera menikah, sebagai contoh teknik al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Para peneliti berbeda-beda dalam memikirkan batasan usia jaminan bagi individu yang dianggap remaja. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.[[33]](#footnote-33) Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.[[34]](#footnote-34) Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.[[35]](#footnote-35)

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Hukum Positif mengenai pernikahan dini adalah undang-undang menetapkan batas usia untuk menikah, di Indonesia adalah 19 tahun. Peraturan dapat disetujui oleh pengadilan dengan pertimbangan tertentu. Hukum positif sselanjutnya yaitu Perlindungan anak, tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini terhadap kesejahteraan dan pendidikan mereka. Selanjutnya menurut Hukum Islam, yang pertama adalah Perkembangan (baligh), angka penting yang menentukan status perkawinan, biasanya ditandai dengan tanda-tanda pubertas yaitu haid dan ihtilam. Kedua Standar al-zari'ah, merupakan perilaku menjauhi keburukan yang lebih besar, menonjolkan status fisik, mental dan mendalam sebelum menikah.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.”. Pada tahun 209, ayat tersebut diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai usia 19 tahun.” Perubahan kedua mengubah perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan mejadi 19 tahun. Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, menyatakan bahwa tujuan dari perubahan undang-undang adalah untuk melindungi hak anak dan mencipakan perkawinan yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi jumlah anak yang menyalahgunakan praktik pernikahan usia dini. Faktanya, pernikahan dini memiliki banyak efek negatif. Plan Indonesia menemukan bahwa pernikahan usia dini berdampak negatif pada masa depan perempuan karena pernikahan usia dini akan membatasi kemampuan perempuan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan pada usia mereka. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 sebelum diubah memiliki pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini, seseorang yang belum berusia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak." Dalam situasi seperti ini, orang tua harus memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

1. Untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan mereka.
3. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Di sini, orang tua juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka tidak menikah sebelum usia mereka memenuhi syarat untuk menikah.

Jasra Putrabatas, ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengatakan usia perkawinan ideal "bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun" untuk memiliki usia fisik dan psikologis yang cukup untuk mendirikan rumah tangga dan menjalankan fungsi keluarga. Dia berpendapat bahwa anak-anak di bawah usia dua puluh tahun belum dapat melakukan tugas keluarga seperti mencari nafkah. Pada tanggal 16 September 2019, tepatnya, DPR mengesahkan perubahan undang-undang No. 16 tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Selain menetapkan batas usia perkawinan pada ayat 1 Pasal 7 Undang- Undang Perkawinan, ayat 2 menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung." Pasal ini juga menjelaskan berapa usia seseorang yang mengalami kecelakaan, seperti hamil di luar nikah, dan berapa lama. Selanjutnya, tim pengadilan akan memeriksa keputusan untuk menentukan apakah itu diterima atau tidak.

Beberapa kelompok menafsirkan praktik perkawinan Rasulullah seperti yang dilakukannya saat menikahi Aisyah Ra, yang berusia 6 tahun, dan tinggal bersamanya saat berusia 9 tahun. Akibatnya, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan Rasulullah harus kita ikuti. Dalam kitab Ushul Al-fiqh Al-islamy jilid 1, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan Nabi dibagi menjadi tiga kategori: "Pertama, perbuatan jibliyah yaitu yang dilakukan beliau dalam kapasitas manusia biasa" seperti duduk, berdiri, dan makan minum. Kedua, "perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw saja dan bukan kewajiban untuk umat beliau" seperti sholat tahajud dan boleh menikahi wan. Ketiga, bersama dengan kedua di atas, adalah "perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori tasy'ri.

Beberapa kelompok menafsirkan praktik perkawinan Rasulullah seperti yang dilakukannya saat menikahi Aisyah Ra, yang berusia 6 tahun, dan tinggal bersamanya saat berusia 9 tahun. Akibatnya, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan Rasulullah harus kita ikuti. Dalam kitabnya yang disebut Ushul Al-fiqh Al-islamy jilid 1, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan Nabi dibagi menjadi tiga kategori: "Pertama, perbuatan jibliyah yaitu yang dilakukan beliau dalam kapasitas manusia biasa" seperti duduk, berdiri, dan makan minum. Kedua, "perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw saja dan bukan kewajiban untuk umat beliau." Boleh menikahi wanita lebih dari empat orang, seperti halnya sholat tahajud. Ketiga, bersama dengan yang kedua di atas, adalah "perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori tasy'ri yaiti yang berlaku bagi kita". Dalam kasus ini, hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Saw menikahi Aisyah, yang saat itu berusia 6 tahun, dan tinggal bersamanya pada usia 9 tahun, termasuk dalam kategori tindakan Nabi yang hanya dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk ummatnya. Selanjutnya, Ibn Syubramah menyatakan bahwa "pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah tidak bisa dijadikan dalil dalam memutuskan sebuah perkawinan karena agama melarang perkawinan anak- anak sebelum usia pubertas." Menurut Ibn Syubramah, tujuan dari perkawinan adalah "memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan", meskipun kedua hal tersebut tidak terjadi pada anak-anak yang belum berusia baligh. Abu Bakar Al-‘Asham mengatakan kepada Ibn Syabramah bahwa "anak kecil, laki-laki maupun wanita tidak dibenarkan".

Misalnya diperbolehkan menikah sebelum baligh, maka ayat ini bukanlah suatu keuntungan karena mereka tidak perlu menikah menurut Ibnu Syabramah. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hazm, yang mengharamkan seorang ayah mengawini anaknya yang belum baligh, padahal ia belum baligh. Saat itu terjadi antara Aisyah dan Rasulullah. Dia setuju bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki anak, bagi wanita. Mereka yang belum puber sebenarnya belum bisa melahirkan anak. Menurut Quraish Shihab, seseorang yang mengawini anak di bawah umur dengan dalih Rasulullah melakukannya demi Aisyah yang masih di bawah umur karena dia membandingkan dirinya dengan Rasulullah..

Mengenai persamaan hukum Islam dan hukum positif, Tujuan ditetapkannya kedua undang-undang ini adalah untuk mengatur kehidupan manusia dengan definisi yang jelas tentang usia dalam undang-undang dan batasan usia berdasarkan perbedaan pendapat, diharapkan kehidupan rumah tangga akan tercipta tangga yang harmonis berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kemudian ketika Anda menentukan batasan usia, salah satu aspek dalam pernikahan adalah kedewasaan, karena beberapa orang dianggap dewasa ketika mereka menjadi wanita. Saya sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah, maka itu didasarkan pada ini. peraturan bahwa usia dianggap siap untuk berkembang biak. Bedanya, sumber kedua undang-undang ini pasti berbeda. Hukum mempunyai sumber hukum substantif yang positif, yaitu faktor-faktor yang turut mempengaruhi terbentuknya hukum atau tempat diambilnya bahan hukum, seperti norma, tradisi, dan adat istiadat. Kemudian hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits kemudian beberapa ulama yang ilmunya dipelajari secara mendalam mengubahnya untuk menentukan hukumnya.

Mengenai hukum positif ada batasan umur, sebutkan angka yang mempunyai arti batasan usia yang jelas, sedangkan dalam hukum Islam, perbedaan penafsiran ulama dan tidak adanya nash di dalamnya. Ada beberapa pendapat dan hadis dari Hati. dan yang sesuai dengan keadaan masyarakat di mana mereka tinggal. Dengan ketentuan multitafsir Islam juga dapat melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan adat menurut ketentuan Islam. “Masalah kemiskinan tidak mempunyai batasan umur, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyesuaikan permasalahan menurut situasi, kepentingan dan keadaan pribadi dan adat istiadat masyarakat setempat, yaitu kematangan fisik yang jelas dan “Dalam agama, spiritualitas kedua belah pihak diutamakan”.

Nabi SAW mengingatkan generasi muda untuk bergegas menikah untuk menjaga visi dan melindungi mereka, alat kelamin mereka. Secara umum Nabi tidak mengharamkan pernikahan di usia muda. Pendapat tentang batasan usia menikah dalam Islam berbeda-beda yang diputuskan oleh para Ulama. Tentang batasan pernikahan menurut hukum Islam.

Beberapa ulama mempunyai pendapat berbeda, antara lain:

1. Menurut Ibnu Katsir, masa perkawinan adalah “usia tua atau bijaksana". Adapun mengenai pubertas, ini "mimpi di dalam mimpi mengeluarkan air, dan dengan air itu lahirlah seorang anak". Pendapat Ibnu Katsir Mengenai usia menikah, tidak berdasarkan hanya pada kedewasaan saja, melainkan pada usia atau kecerdasan.
2. Menurut Rasyid Ridha, Bulugh al-nikah berarti “seseorang yang telah mencapai umur menikah, yaitu sampai melihat mimpi”. Di usia ini mereka bilang bisa melahirkan anak. Jadi hatinya tergerak untuk menikah, dia fokus pada aspek spiritual, yaitu dia memandangnya sikap dan perilaku orang tersebut.
3. Jika kita melihat pemikiran para ulama klasik (salafi) seperti Malik, Syafi, Hambali dan Hanafi, mereka tidak memerlukan mumayi atau kedewasaan calon pengantin. dan mempelai laki-laki, cukuplah masa pubertas dan pubertas bagi mereka.” Amalan ini bukannya tanpanya. Namun alasannya adalah tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang dengan jelas mengatur batasan usia untuk menikah. Para ulama fiqih klasik berpendapat bahwa orang yang menikah telah mencapai usia pubertas. Secara fisik laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi.
4. Hamka berpendapat bahwa “bulugh al-nikah artinya kedewasaan.” "Kematangan tidak bergantung pada usia, tetapi pada kecerdasan atau kematangan pikiran. Karena ada anak-anak yang belum dewasa, padahal sudah dewasa bijaksana, dan juga dewasa, tetapi pikiran mereka belum matang dan dewasa”.
5. Menurut Buya Yahya, usia perkawinan pada saat itu tidak terbatas seseorang ingin menikahi seorang wanita, misalnya pada usia dini, seorang anak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua siapa yang bisa memimpin wanita. Membandingkan pendapat Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama, dia secara klasik fokus pada sisi fisik orang luar dan pada saat yang sama dia memiliki bukallaf. Menurut ulama masa kini, Rasyid Ridha, beliau berfokus pada spiritual, “yaitu sikap dan perilaku seseorang”. Ini berarti menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan tentang perkawinan dilangsungkan berdasarkan ulama dan ulama klasik zaman modern.

### Dasar Hukum Dispensasi Kawin di Indonesia

Hubungan di bawah umur dapat diselesaikan dengan menyebutkan suatu peraturan, misalnya sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Nomor 16 Tahun 2019, koreksi terhadap Peraturan Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “jika terjadi penyimpangan pengaturan usia sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wali baik laki-laki maupun orang tua perempuan dapat meminta penjatahan kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat kuat disertai dengan bukti- bukti pendukung yang cukup.” Terhadap kejadian “penyimpangan” yang ditandai dengan klarifikasi Peraturan Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut harus diselesaikan dengan mengajukan permohonan peraturan oleh wali salah satu atau kedua pemain dari rencana lady of the hour dan lucky man kepada Pengadilan Agama bagi orang pribadi yang beragama Islam dan Pengadilan Agama bagi orang lain, apabila orang tersebut telah dewasa di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Untuk sementara, makna dari "Alasan sangat mengerikan" adalah apa yang terjadi ketika tidak ada keputusan lain dan sangat penting pernikahan itu terjadi. Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang cukup” adalah adanya surat pernyataan yang menunjukkan bahwa umur calon pengantin dan laki-laki yang beruntung masih dibawah ketentuan undang-undang dan data surat dari pekerja kesejahteraan yang menjunjung tinggi penjelasan wali bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut adalah sangat kritis.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.[[36]](#footnote-36) Berbicara mengenai penegakan hukum, Soekanto memberikan pengertian Pemolisian dalam arti luas mencakup latihan untuk melakukan, membuat perbedaan, dan melakukan tindakan yang sah terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek yang sah baik melalui metode hukum atau sistem yang berbeda. Dalam arti terbatas, mengawasi kegiatan pelaksanaan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap pedoman hukum. Terdapat komponen mendasar dalam pemolisian, pengorganisasian yang sah, pelaksanaan peraturan, aktivitas yang sah, dan tujuan pertanyaan, sedangkan faktor yang mempengaruhi Pemolisian memiliki variabel sahnya sendiri, pemolisian, faktor penunjang perkantoran dan perkantoran, faktor wilayah setempat, dan variabel sosial. Bicara kepolisian, salah satunya melalui prosedur pengadilan jika ada masalah suami-istri.[[37]](#footnote-37)

Pasal 7 Peraturan No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 bagian, sedangkan dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan pada sebagian ekspresi. Dalam Peraturan Perkawinan perubahan terakhir, pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa penjatahan tetap dilakukan oleh wali dari laki-laki atau perempuan yang hanya diperbolehkan disebutkan oleh Pengadilan. Ungkapan “otoritas lain” ada dalam undang-undang. Hubungan di masa lalu dikecualikan karena dianggap tidak jelas. Ketidakjelasan ini disebabkan karena banyak pejabat yang berwenang memberikan jatah tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan saja, namun juga oleh perwakilan dari Kantor Urusan Ketat (KUA) dan Lurah. Praktisnya di lapangan, dengan asumsi ada salah satu otoritas yang menolak memberikan suatu peraturan, sebenarnya ada pejabat lain yang terpilih yang bisa memberikannya. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan bahwa sebelumnya penjatahan itu diberikan tanpa syarat ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum, peraturan harus diselesaikan hanya dengan meminta kepada pengadilan.[[38]](#footnote-38)

Perubahan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang dispensasi kawin merupakan langkah positif dalam upaya melindungi anak- anak dari pernikahan dini. Dengan menetapkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan oleh pengadilan, diharapkan proses pemberian dispensasi akan lebih ketat dan terstandar. Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi dan penerapan undang-undang di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun, namun dalam praktiknya, masih ada variasi dalam pemberian dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan budaya, pemahaman hukum, dan kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerah.

Di beberapa daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin masih menjadi kendala. Jarak yang jauh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan seringkali menjadi hambatan bagi keluarga yang ingin mengajukan dispensasi. Akibatnya, masih ada kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui proses dispensasi yang sah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membentuk layanan terpadu yang dapat memfasilitasi proses pengajuan dispensasi kawin di daerah-daerah terpencil. Layanan ini dapat berupa unit pelayanan keliling yang secara berkala mengunjungi daerah- daerah yang jauh dari pengadilan, atau pembentukan pos-pos layanan di tingkat kecamatan yang dapat membantu masyarakat dalam proses pengajuan dispensasi.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan yang baru dan prosedur pengajuan dispensasi kawin juga perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih belum memahami dengan baik aturan baru tentang batas usia perkawinan dan prosedur pengajuan dispensasi. Pemerintah, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, perlu melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal ini. Peran hakim dalam proses pemberian dispensasi kawin juga sangat krusial. Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami aspek hukum dari permohonan dispensasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan dari calon pengantin di bawah umur. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin perlu terus dilakukan.

Saat memutuskan apakah akan memberikan dispensasi atau tidak, hakim harus melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon. "Alasan yang sangat mendesak" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang harus diinterpretasikan secara ketat dan hati-hati. Hakim harus memastikan bahwa pernikahan benar-benar merupakan pilihan terbaik bagi kepentingan anak, bukan hanya solusi cepat untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi keluarga. Selama proses pemeriksaan, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada anak yang akan dinikahkan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Anak harus diberi informasi yang cukup tentang konsekuensi dari pernikahan di usia muda dan diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang rencana pernikahan tersebut.

Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan ahli-ahli dari berbagai bidang dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Misalnya, psikolog anak dapat memberikan penilaian tentang kesiapan mental anak untuk menikah, sementara tenaga kesehatan dapat memberikan informasi tentang risiko kesehatan dari pernikahan dan kehamilan di usia muda. Pekerja sosial juga dapat memberikan penilaian tentang kondisi sosial ekonomi keluarga dan alternatif solusi selain pernikahan dini. Pada konteks yang lebih luas, upaya pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya bertumpu pada pengetatan prosedur dispensasi kawin. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu aspek penting adalah peningkatan akses terhadap pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan penurunan angka pernikahan dini.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya untuk memastikan semua anak, terutama anak perempuan, dapat mengakses pendidikan hingga minimal tingkat sekolah menengah atas. Program- program seperti beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu, penyediaan transportasi sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal perlu terus digalakkan. Selain pendidikan formal, pendidikan kesehatan reproduksi dan hak- hak anak juga perlu ditingkatkan. Banyak kasus pernikahan dini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan risiko dari hubungan seksual di usia muda. Program-program edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan sesuai usia perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Aspek ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Seringkali, faktor ekonomi menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Oleh karena itu, program- program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga perlu terus dikembangkan. Ini bisa mencakup program-program pelatihan keterampilan untuk orang tua, akses terhadap kredit mikro untuk mengembangkan usaha kecil, atau program bantuan sosial yang bersyarat (misalnya bantuan tunai dengan syarat anak tetap bersekolah).

Peran media massa dan media sosial juga sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan edukasi tentang prosedur dispensasi kawin. Media dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini, hak-hak anak, dan prosedur yang benar untuk pengajuan dispensasi kawin. Kampanye-kampanye kreatif melalui media sosial yang menyasar kaum muda juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat krusial dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Di banyak daerah di Indonesia, pandangan dan fatwa dari tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam upaya edukasi dan pencegahan pernikahan dini. Para tokoh agama perlu didorong untuk memberikan interpretasi agama yang mendukung perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Pada konteks hukum, selain pengetatan prosedur dispensasi kawin, juga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik-praktik pernikahan di bawah umur yang ilegal. Sanksi yang jelas dan tegas perlu diberlakukan bagi pihak-pihak yang memfasilitasi atau melakukan pemalsuan dokumen untuk memungkinkan pernikahan di bawah umur. Ini termasuk petugas pencatat pernikahan, tokoh agama, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pernikahan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan implementasi undang-undang perkawinan yang baru. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (perda) yang mendukung implementasi undang-undang perkawinan, serta mengembangkan program-program inovatif yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat untuk mencegah pernikahan dini. Misalnya, beberapa daerah telah mengembangkan program "Desa Layak Anak" yang salah satu indikatornya adalah tidak adanya pernikahan anak di desa tersebut. Program-program seperti ini perlu terus dikembangkan dan diperluas ke daerah-daerah lain. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi dan mencegah rencana pernikahan anak di wilayahnya.

Kerjasama lintas sektor juga sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan implementasi undang-undang perkawinan yang baru. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta lembaga penegak hukum. Masing-masing instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Peran masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok-kelompok masyarakat, juga tidak bisa diabaikan. Organisasi- organisasi ini seringkali memiliki pengalaman dan keahlian dalam melakukan pendampingan terhadap korban atau potensial korban pernikahan dini. Mereka juga dapat berperan dalam melakukan advokasi kebijakan dan monitoring terhadap implementasi undang-undang perkawinan di lapangan.

Penelitian dan pengumpulan data yang akurat tentang pernikahan dini dan praktik pemberian dispensasi kawin juga perlu terus dilakukan. Data yang komprehensif dan terkini sangat penting untuk memahami tren dan pola pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif di masa depan. Pada konteks internasional, Indonesia juga perlu terus berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk mengakhiri praktik pernikahan anak. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memberikan contoh bagaimana nilai-nilai Islam dapat sejalan dengan upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Kerjasama dan pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini juga perlu terus dilakukan.

Akhirnya, perlu disadari bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dan implementasi undang-undang perkawinan yang baru adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Perubahan sosial dan budaya tidak terjadi dalam semalam, dan akan selalu ada tantangan dan resistensi dalam proses ini. Namun, dengan upaya yang konsisten dan komprehensif, Indonesia dapat berharap untuk mencapai kemajuan signifikan dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini dan memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak- hak mereka sepenuhnya. Pada konteks penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, terutama polisi dan jaksa, juga perlu diperkuat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang undang-undang perkawinan yang baru dan prosedur penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pelatihan khusus tentang penanganan kasus yang melibatkan anak-anak juga perlu diberikan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat juga perlu dikembangkan. Masyarakat harus diberi informasi yang jelas tentang cara melaporkan kasus-kasus pernikahan dini atau rencana pernikahan dini yang mereka ketahui. Hotline atau layanan pengaduan online yang dapat diakses 24 jam bisa menjadi salah satu solusi untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus-kasus tersebut. Meninjau upaya pencegahan pernikahan dini, peran sektor swasta juga tidak bisa diabaikan. Perusahaan-perusahaan, terutama yang beroperasi di daerah-daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi, dapat berkontribusi melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan anak-anak dan remaja. Misalnya, dengan menyediakan beasiswa pendidikan, program magang, atau pelatihan keterampilan bagi remaja.

Akhirnya, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan program-program yang telah dijalankan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi praktik- praktik terbaik yang dapat direplikasi, serta mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, konsisten, dan adaptif, Indonesia dapat berharap untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan hak-hak anak di masa depan.

1. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 24. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=954239# [↑](#footnote-ref-1)
2. Fauziatu Shufiyah, *Perkawinan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, 2018 hlm.49. https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-4)
5. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005 hlm. 16-17. Lihat Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat. Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Skripsi, hlm. 2., <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2991/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Muqaffi, *ProblematikaPemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak*, Skripsi, Banjarmasin,2021, hlm. 1, https://idr.uin-antasari.ac.id/16751/ [↑](#footnote-ref-6)
7. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 87. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194198 [↑](#footnote-ref-7)
8. I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hlm. 169. https://books.google.co.id/books/about/Hukum\_adat\_Bali\_dengan\_aneka\_masalahnya.html?hl=id &id=qnoaAAAAIAAJ&redir\_esc=y [↑](#footnote-ref-8)
9. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek),*Pradnya Paramita, Jakarta, 2013. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn- purwakarta/index.php?p=show\_detail&id=2000 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ridwan HLM.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.196, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6865 [↑](#footnote-ref-10)
11. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta,Balai Pustaka, 1976, hlm. 88, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10977 [↑](#footnote-ref-11)
12. Riduan Syahrani, et al., *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni,1978, hlm. 133, https://books.google.co.id/books/about/Masalah\_masalah\_hukum\_perkawinan\_di\_Indo.html?id=ht LDnQEACAAJ&redir\_esc=y [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., hlm, 134 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nur Iman, *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56236 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kholilurrachman,*Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur pasca UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Repository UIN Jakarta, Jakarta, Maret 2021.

    https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56696/1/KHOLILURRACHMAN%20-

    %20FSHLM.pdf [↑](#footnote-ref-16)
17. Rohmat Saripudin, *Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt. P/2017) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN)*, 2019. http://repository.uinbanten.ac.id/4182/1/DISPENSASI%20NIKAH%20ANAK%20DI%20BAWAH%20UMUR.pdf [↑](#footnote-ref-17)
18. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm 182. https:/[/www.google.co.id/books/edition/Penelitian\_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](http://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1) [↑](#footnote-ref-18)
19. M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,Kencana, Jakarta,2008, hlm. 115. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7454 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 794. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 45- 46, https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1827 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77, https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/73799 [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, hlm. 183. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/326 [↑](#footnote-ref-24)
25. BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2011, Jakarta. https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp7a285be7c0full.pdf [↑](#footnote-ref-25)
26. Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur‟an Dan As Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia Perbandungan fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Citra Utama, 2011, hlm. 29, https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/326 [↑](#footnote-ref-27)
28. Fithriyani Daulay, *Dispensasi Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Study Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan)*, Universitas Andalas, 2012.hlm. 21, [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/4182/1/DISPENSASI%20NIKAH%20ANAK%20DI%20BAWA](http://repository.uinbanten.ac.id/4182/1/DISPENSASI%20NIKAH%20ANAK%20DI%20BAWA) H%20UMUR.Pdf [↑](#footnote-ref-28)
29. Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, *Dar al* „Abidin, Surabaya, hlm. 15- 16 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160 [↑](#footnote-ref-29)
30. Amir Syarifuddin, 2008*, Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. III, Prenada Media, Jakarta, hlm. 394 [↑](#footnote-ref-30)
31. Baligh adalah cukup umur. *Lihat Departemen Pendidikan Nasional*, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. III, hlm. 96 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160 [↑](#footnote-ref-31)
32. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, Jilid II, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 3-4, <http://repository.radenintan.ac.id/1352/3/BAB_II.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad Jawad Mughniyyah, tt, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut, hlm. 16, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Sonny Dwi et.al, *Dispensasi Pengadilan : Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur* , JHPER Vol. 3, No. 2, hlm. 195 [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2019 hlm. 3, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/1215> [↑](#footnote-ref-37)
38. Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Vol. 2. 2020. hlm. 148,<http://repository.uinbanten.ac.id/4182/1/DISPENSASI%20NIKAH%20ANAK%20DI%20BAWA>H%20UMUR.pdf [↑](#footnote-ref-38)